

Proses Munculnya *Euro-Islam* sebagai *Transnational Norms* di kalangan Muslim Eropa

Mochamad Faisal Karim¹

Abstract

The study focuses on the formation process of Euro-Islam as a transnational norm among European Muslim to integrate Muslim into European society. There is a growing norm among the European Muslim society called as Euro-Islam norm. In this research, I use norm life cycle theory, brought by Martha Finnemore and Kathryn Sikkink to assess the process of formation of Euro-Islam norm. Although Euro-Islam has not yet entered the stage of internalization norm, I argue that Euro-Islam gradually forms a norm which theoretically will become a base for the formation of future Euro-Islam identity among European Muslim.

Keywords: Euro-Islam, Norm, integration, identity

Pendahuluan

Eropa dikenal sebagai kawasan yang menjunjung tinggi multikulturalisme. Sejarah peperangan telah membuat Eropa membangun identitas bersama sehingga mencapai integrasi yang sedemikian rupa. Nilai-nilai universal seperti demokrasi, HAM (Hak Asasi Manusia), dan toleransi terhadap perbedaan telah menjadi nilai-nilai bersama (*shared values*) Eropa di bawah konsep multikulturalisme (Moddod, 2006). Sisi lain, Eropa tidak mampu menempatkan Islam sebagai bagian dari multikulturalisme Eropa. Fakta bahwa persinggungan antara Islam dan Eropa telah dimulai seribu tahun yang lalu, tidak cukup membuat Eropa memahami gambaran utuh mengenai Islam. Alih-alih, Islam dianggap seperti peradaban asing yang tidak pernah dipahami dan dimengerti, Islam diposisikan selalu sebagai antitesis dari Barat.

¹ Alumnus Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia. Sekarang dia bekerja sebagai staf ahli Ketua Komisi 1 DPR RI Bidang Kajian Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri. Dia bisa dihubungi di ical_karim@yahoo.com

Data statistik terakhir mengenai demografis Eropa menunjukkan bahwa orang Islam di Eropa (Uni Eropa) berjumlah 4% dari total penduduk Eropa atau sekitar 23 juta pada tahun 2003 meski data yang tercatat sekitar 15.5 juta. Presentase ini jauh lebih besar di Eropa Barat di mana pertumbuhan populasi muslim sungguh cepat. Padahal pada tahun 1982, populasi muslim di Eropa hanya 6.8 juta atau 1.6 %. Bahkan tiga dekade sebelumnya yakni pada tahun 1950-an, populasi Muslim berada dibawah 0,5 %. Jumlah ini sungguh sangat kecil bila dibandingkan dengan populasi minoritas lainnya seperti Yahudi dan Gipsi, namun, selama kurun waktu tiga dekade ini, telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap jumlah populasi muslim di Eropa (Savage, 2005).

Peningkatan populasi Muslim menjadi sebuah permasalahan baru di Eropa. Apalagi dengan perubahan karakteristik imigran Muslim generasi kedua dan ketiga di mana mereka tidak lagi menjadi bagian dari imigran melainkan telah menjadi bagian dari warga negara. Hal ini membuat permasalahan baru ini menjadi kompleks (Cesari, 2003, h. 251). Permasalahan tersebut tidak lain adalah permasalahan identitas.

Permasalahan ini memunculkan sebuah pertanyaan serius terhadap masa depan Eropa: "Apakah Eropa akan bertransformasi dan menjadi kuat atau malah sebaliknya, menjadi pecah dan kehilangan identitas bersamanya? Kemunculan imigran Muslim di Eropa yang memiliki karakteristik lebih suka berintegrasi tanpa menghilangkan budaya mereka daripada berasimilasi, membuat Eropa mengalami kegamangan identitas (Savage, 2005).

Diakibatkan diskriminasi secara ekonomi dan sosial yang dilakukan Eropa secara terus-menerus, muncullah sekelompok muslim Eropa yang tertutup dari masyarakat Eropa dan mencoba membangun masyarakat mereka sendiri. "*They're there [in Europe] but not there,*" kata Shireen Hunter (seperti dikutip dalam Savage, 2005). Kebanyakan dari mereka adalah orang miskin. Mereka teralienasi dari masyarakat Eropa dan juga terputus hubungan dengan orang tua mereka sehingga mereka mencari identitas baru bagi diri mereka. Radikalisme Islam menjadi pilihan.

Sisi lain, berbagai gerakan dan inisiatif muncul untuk merekonsiliasi dua peradaban yang saling bertentangan ini. Banyak yang melihat bahwa inti dari ketegangan antara Islam dan Eropa yang berujung pada krisis identitas di Eropa adalah karena kurangnya dialog antarperadaban yang membuat masih banyak prasangka-prasangka yang akhirnya menjadi *civilization fortress* (Savage, 2005). Usaha-usaha dialog peradaban pun dimulai untuk menisbikan *clash of identity* antara Islam dan Eropa yang tentunya ditakutkan akan berakhir menjadi *clash of civilization*.

Baru-baru ini di Eropa, ada usaha untuk membangun norma yang mampu mengintegrasikan muslim dengan masyarakat Eropa. Dengan asumsi dasar Islam dan Eropa memiliki persamaan inti peradaban yang sama, proyek peradaban ini tidaklah mustahil dilakukan. **Konsep Euro-Islam**

adalah konsep yang menawarkan sebuah pemahaman liberal terhadap Islam yang dapat diterima baik oleh imigran muslim maupun masyarakat Eropa di mana ia mampu mengakomodasi ide-ide Eropa mengenai sekularitas dan individualisme (Tibi, 2008).

Namun konsep Euro-Islam tidaklah tunggal. Ada kontestasi wacana di dalamnya. Pada awalnya ia merupakan wacana, namun sekarang ia berubah menjadi sebuah norma yang coba diimplementasikan dan diperjuangkan oleh gerakan-gerakan *civil society* dan *think tank* di Eropa. Meski secara wacana ia masih terus mengalami kontekstualisasi dan perdebatan, kenyataannya, ia sedang bergerak dan membentuk sebuah norma baru. Norma yang mencoba menempatkan Islam sesuai dengan masyarakat Eropa yang sekular.

Pada tataran praktis, usaha-usaha untuk membangun identitas Euro-Islam di tengah-tengah kaum muslim Eropa terus dilakukan. Selain membumikan norma Euro-Islam di kalangan muslim Eropa, terdapat usaha-usaha melakukan dialog peradaban dengan Eropa agar identitas Euro-Islam dapat diterima sebagai solusi bagi permasalahan identitas Islam di Eropa. Dialog-dialog serta seminar yang dilakukan Tariq Ramadan berusaha untuk menumbuhkan kesadaran identitas Euro-Islam ini. Ramadan pernah berujar "*The challenge today is to make Muslims understand you don't have to be less Muslim to be more European. You can be both*". Selain usaha yang dilakukan Tariq Ramadan, terdapat beberapa usaha lainnya yakni pembentukam *Euro-Islam Project* sebagai usaha untuk membumikan konsep Euro-Islam kepada seluruh muslim di Eropa (Ramadan, 2004).

Dengan munculnya Euro-Islam pada tataran diskursus, setidaknya terdapat landasan konseptual bagi terciptanya integrasi antara Eropa dan Islam. Euro-Islam sendiri tidak hanya mampu menjadi landasan baru bagi identitas Muslim Eropa melainkan mampu menjadi instrumen bagi terciptanya dialog peradaban yang tanpa prasangka. Pada tataran diskursus, usaha-usaha membentuk Euro-Islam menjadi solusi paling mungkin antara ketegangan Islam dengan Eropa sekarang ini. Mau tidak mau, ide mengenai *Euro-Islamic Identity* akan menjadi sebuah proyek bersama Eropa. Dengan demikian, rumusan permasalahan yang ingin dielaborasi dalam tulisan ini adalah bagaimana proses munculnya *Euro-Islam* sebagai *transnational norms* di kalangan muslim Eropa untuk mewujudkan integrasi muslim di Eropa? Penulis menggunakan teori *life cycle norms* dalam melakukan analisis terhadap tahapan pembentukan norma Euro-Islam.

Konsep Euro-Islam

Konsep *Euro-Islam norm* masih merupakan konsep yang terus menerus menuai pro-kontra. Norma Euro-Islam yang menghormati nilai-nilai pencerahan dapat didefinisikan sebagai *Muslim Rejection of European aspiration of muslim assimilation into western European society, and instead opting for integration*. Sehingga proses pembentukannya pun melibatkan muslim dan serta nilai-

nilai dari masyarakat Eropa di mana muslim tinggal. Mereka berperan besar dalam membentuk corak Islam Eropa yang unik dan berbeda dengan Islam di daerah lainnya di dunia (Tibi, 2008).

Euro-Islam juga dapat didefinisikan sebagai *New Form of Citizenship* di mana ia berpendapat bahwa pemuda-pemuda muslim yang merasa kecewa dengan kondisi yang mereka hadapi di Eropa menjadikan Islam sebagai pelarian daripada obat-obatan terlarang (Cesari, 2009). Mereka kembali bukan kepada pemahaman tradisional Islam dari negara asal orang tua mereka, melainkan langsung kembali kepada ajaran Islam. Islamisasi muncul sebagai fenomena pembentukan solidaritas di kalangan anak muda muslim Eropa.

Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan adalah teori Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink yang membahas mengenai pembentukan norma di level internasional. Teori yang dimuat dalam Jurnal *International Organization* (Finnemore & Sikkink, 1998) ini membahas mengenai bagaimana sebuah norma dapat muncul dan menjadi bagian dari norma internasional yang diterima oleh semua orang.

Layaknya kebanyakan kaum konstruktivis, Finnemore dan Sikkink pun yakin betapa pentingnya struktur nonmateri seperti ide atau norma dalam mendefinisikan kepentingan karena struktur nonmateri dapat membentuk identitas seseorang. Menurut kaum konstruktivis, identitas juga dapat membentuk kepentingan seseorang yang dengan demikian juga dapat mengarahkan perilaku seseorang. Tabel dibawah ini adalah rangkuman dari teori yang dibuat oleh Finnemore dan Sikkink dalam melihat pembentukan norma pada level internasional.

Tabel 1. Dimensi dari tahapan pembentukan Identitas

Dimension	Stage 1 Norm Emergence	Stage 2 Norm Cascade	Stage 3 Internalization
Actors	Norm Entrepreneur with Organizational Platform	State, International Organization, Networks	Law, Profession
Motives	Altruism, empathy, ideational commitment	Legitimacy, reputation, esteem	Conformity
Dominant Mechanisms	Persuasion	Socialization, institutionalization, demonstration	Habit, institutionalization

Tahap pertama disebut oleh Finnemore dan Sikkink sebagai *Norm Emergence*. Aktor yang bermain pada tahapan ini adalah *norm entrepreneur*. Finnemore dan Sikkink walaupun tidak secara eksplisit menjelaskan siapa *norm entrepreneur*, menggambarkan *norm entrepreneur* adalah individu yang pertama kali melontarkan ide mengenai sebuah gagasan yang lambat laun akan menjadi norma. Namun, Finnemore dan Sikkink melihat bahwa *norm entrepreneur* saja tidak cukup. Ia harus didukung oleh *organizational platform*

yang mampu mengejawantahkan gagasan-gagasan *norm entrepreneur* ke dalam bentuk nyata.

Tahap pertama juga ditandai dengan motif yang berwujud komitmen ideasional. Tujuan yang mendorong *norm entrepreneur* untuk menelurkan sebuah gagasan tidak lain adalah komitmen akan gagasan yang ia percaya dan ingin ia perjuangkan. *Norm entrepreneur* bergerak berlandaskan komitmen yang ia buat dan ide yang ia yakini. Mekanisme yang berlaku adalah persuasi. *Norm entrepreneur* yang didukung oleh *organizational platform* melakukan penyebaran norma melalui persuasi dan diseminasi.

Pada tahap kedua, aktor yang bermain adalah negara, organisasi internasional, dan *network of norm entrepreneur*. Menurut Finnemore, sebuah gagasan norma dari *norm entrepreneur* akan diadopsi oleh baik negara, organisasi internasional, atau individu. Aktor-aktor inilah yang bermain dalam interaksi yang akhirnya membentuk sebuah norma. Tahapan kedua ditandai oleh motif untuk mencari legitimasi dan reputasi. Pembentukan Norma tidak lagi bergerak atas dasar komitmen ideasional saja melainkan sudah masuk menuju usaha mencari legitimasi atas norma tersebut. Karena motif pada tahapan kedua ini adalah legitimasi, maka mekanisme dominan dalam melakukan usaha pembentukan norma adalah dengan sosialisasi atau institusionalisasi. Bahkan, bisa saja terjadi kedua-duanya.

Pada tahap ketiga, norma sudah masuk pada tahapan internalisasi. Pada tahap ini, norma sudah terlembagakan dalam bentuk hukum maupun perilaku negara. Artinya, aktor bukan lagi negara atau organisasi internasional melainkan peraturan dan hukum. Motif dari tahapan ketiga ini bukan lagi mencari legitimasi melainkan konformitas. Orang melakukan tindakan sesuai norma karena ingin melakukan konformitas terhadap norma yang sudah ada. Pada tahap ini, mekanisme dominannya adalah kebiasaan serta institusionalisasi.

Apa yang coba disampaikan Finnemore dan Sikkink adalah adanya tahapan-tahapan dalam pembentukan norma yang harus dilewati norma mampu menjadi identitas. Tahapan-tahapan tersebut pada akhirnya dapat berujung kepada pembentukan identitas dengan syarat semua tahapan dan prasyarat-prasyarat dapat diikuti dan diselesaikan. Teori ini mampu menjelaskan pembentukan-pembentukan norma pada level internasional.

Analisa Tahapan Pembentukan Norma Euro-Islam di Eropa *Norm Emergence*: Tahapan Awal Kemunculan Norma

Dalam teorinya, Finnemore dan Sikkink mengatakan bahwa awal proses pembentukan norma adalah tahap *Norm Emergence*. Tahap *Norm Emergence* ditandai oleh munculnya beberapa aktor yang menjadi *entrepreneurs of norm*. Aktor-aktor ini akan menyebarkan gagasan-gagasan serta ide-ide yang kemudian menjadi dasar dari sebuah norma. *Norm entrepreneurs* dengan demikian menjadi sangat penting posisinya dalam pembentukan norma

karena tugas mereka adalah menciptakan perhatian publik terhadap norma yang mereka coba angkat dengan menggunakan diskursus yang mereka lemparkan ke ruang publik (Finnemore & Sikkink, 1998).

Norm Entrepreneurs: Perdebatan Diskursus Awal Euro-Islam

Melalui pengembangan ide di level diskursus, *norm entrepreneurs* mencoba untuk membangun sebuah *cognitive frame* yang sangat esensial sebagai komponen norma. Dengan demikian, norma yang diangkat akan berkembang dan beresonansi dalam masyarakat sehingga norma dapat dipahami lebih luas oleh khalayak dan pemahaman publik akan norma tersebut membentuk perilaku. Bahkan, ia berujung kepada pendefinisian identitas dalam masyarakat (Finnemore & Sikkink, 1998). Dengan demikian, peran dan keberadaan *Norms Entrepreneurs* sangat dibutuhkan dalam usaha awal melemparkan ide mengenai suatu norma ke masyarakat di mana norma tersebut akan berkembang.

Euro-Islam tidak akan mewujudkan menjadi norma jika hanya menjadi sekedar wacana. Euro-Islam pun merupakan konsep yang dikonstruksi melalui agen serta pengulangan-pengulangan melalui *speech act* oleh intelektual-intelektual muslim di Eropa di media dan seminar-seminar.

Setidaknya, dari hasil pengamatan penulis, terdapat dua *mainstream* dalam memahami Euro-Islam yang dihadirkan oleh dua orang intelektual yang sama-sama membangun dan mengkonseptualisasikan Euro-Islam di ranah wacana dan kemudian berhasil mengimplementasikannya ke ranah praktis. Penulis melihat terdapat dua *norm entrepreneurs* yang mencoba dikembangkan oleh intelektual di ruang publik Eropa. Dua orang intelektual muslim Eropa tersebut adalah Bassam Tibi dan Tariq Ramadan yang membangun basis bagi norma Euro-Islam, karena kontribusi mereka paling nyata dalam penyebaran diskursus mengenai Euro-Islam. Meski keduanya memiliki penafsiran, metodologi, serta cara pandangan yang berbeda mengenai Euro-Islam, namun keduanya berbagi tujuan yang sama yakni mencoba mengintegrasikan muslim dengan masyarakat Eropa.

Bassam Tibi

Bassam Tibi adalah intelektual yang mengklaim dirinya sebagai orang pertama yang mengutarakan ide tentang Euro-Islam. Tibi merupakan orang pertama yang mempopulerkan istilah tersebut meski kemudian ia mengaku istilah yang ia buat itu sekarang mengandung berbagai macam pemaknaan yang jauh berbeda dengan pemaknaan yang ia maksudkan pada awalnya (Nielsen dalam al-Azmeh & Fokas, 2007). Bassam Tibi mengutarakan istilah ini pada tahun 1992 tatkala pemerintah Prancis mencoba meninggalkan pendekatan asimilasi dan mulai menggunakan pendekatan integrasi dalam usaha menjadikan komunitas Muslim sebagai bagian dari masyarakat Prancis. Masyarakat Prancis secara umum lebih liberal dan cenderung tidak

memiliki pandangan rasial dibandingkan Jerman dan Inggris. Di Prancis, jika Anda dapat berbicara bahasa Prancis dengan baik, berperilaku layaknya seorang Prancis, dan berpendidikan Prancis, maka Anda adalah orang Prancis meskipun Anda memiliki kulit yang gelap (Tibi, 2008).

Euro-Islam, menurut Tibi, pada dasarnya adalah *Europeanization of Islam*. Euro-Islam dapat terbentuk melalui reformasi interpretasi terhadap ajaran-ajaran Islam yang paling fundamental. Terdapat usaha untuk menciptakan pemahaman baru akan Islam yang lebih liberal dan lebih terbuka terhadap nilai-nilai Eropa. Inti dari konsepsi Euro-Islam adalah pentingnya Islam untuk menganut ajaran-ajaran seperti toleransi, pluralisme dan sekularisme (Tibi, 2008). Toleransi di sini, tidak ditafsirkan dalam konteks sebagaimana muslim memahaminya, namun sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat Eropa. Toleransi tidak hanya sekedar menerima kehadiran entitas lain di sekeliling kita. Meskipun seruan toleransi terhadap umat beragama dalam Al Qur'an justru lebih banyak daripada seruan untuk perasaan superioritas, bagi Tibi toleransi berarti muslim harus berani sepenuhnya menghilangkan konsep superioritas sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an 3:110.

Bagi Tibi sendiri, ia percaya bahwa proses *Europeanising Islam* melalui penghilangan beberapa aspek dari ajaran Islam seperti konsep syariah dan jihad, dapat membuat Islam diterima di Eropa. Menurut Tibi, dua konsep ini harus dihilangkan dari Islam karena kedua konsep ini tidak sejalan dengan dengan prinsip dasar dari modernitas yakni demokrasi, kebebasan HAM, dan *civil society*. Islam yang telah menghilangkan kedua konsep di atas baru dapat didefinisikan sebagai Euro-Islam. Euro-Islam sendiri tidaklah bersifat universal melainkan partikular. Ia tidak dapat diterapkan selain di Eropa. Ia merupakan sebuah keunikan Eropa di mana Islam menyerap nilai-nilai Eropa. Di sini, Tibi tidak mengedepankan universalisme Islam melainkan partikularisme Islam di mana Islam dapat berbeda-beda di setiap tempat, tergantung kultur di masing-masing wilayah (Tibi, 2008).

Yang akan menjadi ide dasar dari Euro-Islam adalah *laicité* di mana pemahaman akan toleransi dan liberasi melebihi penafsiran konvensional akan toleransi dalam Islam yang masih terbatas bila dibandingkan dengan kultur modern saat ini. Islam liberal ini disebut oleh Tibi sebagai *Islamic Laicism* (Tibi, 2008). Dengan demikian, basis dari Euro-Islam adalah penerimaan akan nilai-nilai politik sekular Eropa dalam identitas keagamaan Muslim.

Tibi jelas sekali menolak strategi politik multikulturalisme, bukan nilai multikulturalismenya sendiri, karena menurutnya, multikulturalisme tidak lain adalah alat bagi para fundamentalis Islam untuk dapat hidup dengan menggunakan identitas keislaman yang mereka miliki tanpa harus berintegrasi dengan masyarakat Eropa (Tibi dikutip dari Der Spiegel, 2009).

Bassam Tibi melakukan berbagai macam daya dan upaya untuk menyebarkan ide mengenai Euro-Islam. Pertama, tentu Tibi mencoba mempopulerkan istilah Euro-Islam melalui seminar-seminar yang ia berikan

di seluruh universitas Eropa. Hasilnya pun terlihat di mana sekarang istilah Euro-Islam sudah populer di kalangan intelektual dan akademisi di universitas-universitas Eropa.

Tariq Ramadan

Rather than being an Islam of immigrants, it must find new answers to the challenges of the time. However, it is based on the "universally valid" fundamental values of Islam
(Tariq Ramadan)

Tariq Ramadan adalah salah seorang intelektual muslim berbakat yang mampu melakukan sintesis antara rasionalitas Barat dan universalisme Islam. Sebagai seorang muslim yang tinggal di Eropa dan memiliki kewarganegaraan Eropa, Ramadan mendapatkan pendidikan sekular dan menyerap nilai-nilai sekularisme Eropa. Namun sebagai seorang muslim dan keturunan Mesir, Ramadan mendapatkan siraman prinsip-prinsip dasar Islam dan nilai-nilai universalisme Islam. Beberapa intelektual Eropa seperti Jocelyne Césari dan Mandaville melihat bahwa Ramadan adalah sosok intelektual yang mampu menjadi inisiator bagi munculnya *truly critical school of Islam* (Ramadan, 2009). Menurut Ramadan, setidaknya terdapat tiga dimensi permasalahan yang dihadapi Muslim Eropa, yaitu masalah *culture*, *identity*, dan *loyalty*. Ketiga permasalahan ini terus menjadi batu sandungan bagi keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat Eropa (Ramadan, 2009).

Terkait dengan dimensi pertama, Ramadan membangun logikanya dalam sebuah preposisi bahwa tidak ada agama tanpa adanya ekspresi budaya. Setiap agama menghasikan ekspresi budaya masing-masing. Namun tidak berarti kita dapat mengatakan bahwa agama sama dengan budaya. Edward Said, salah seorang oksidentalisme pernah berujar bahwa "*I am not a Muslim, I am a Christian, but I am a Muslim by culture*". Perkataan Said ini merupakan ekspresi dari perbedaan antara agama dengan budaya. Sebagai seorang Arab, tentu budaya Islam menjadi bagian daripada budayanya meski Edward Said bukanlah seorang Muslim (Ramadan, 2004).

Ramadan memperlihatkan bagaimana kasus mengenai kedatangan migran Islam ke Eropa dapat menjelaskan argumennya. Pada generasi awal Muslim di Eropa, mereka akan mempraktekkan Islam sebagaimana pengalaman mereka mempraktekkannya di negara asal mereka yang memiliki kulturnya masing-masing. Namun generasi kedua dan ketiga tidak memiliki pengalaman yang serupa dengan generasi pertama. Hal ini membuat praktek Islam pun juga berbeda. Di sinilah Ramadan mengenalkan konsep *culture of religion* yang berbicara mengenai praktek Islam. Dengan demikian, ia bukanlah agama itu sendiri. Tentu akan sangat asing bagi muslim generasi

kedua dan ketiga untuk mempraktekkan *culture of religion* orang tua mereka.

Dengan membedakan antara *culture* dan *religion*, Ramadan dapat menciptakan garis demarkasi yang jelas antara budaya dengan agama. Dengan modal ini, Ramadan maju ke tahap selanjutnya dengan mencoba membangun pemahaman akan adanya *European Islamic Culture*. Budaya di sini merupakan pengertian yang sangat luas. Tentu akan berbeda antara kultur muslim Asia Tenggara dengan kultur muslim Arab. Begitu juga dengan kultur Islam Prancis dengan kultur Islam Inggris. Namun yang ingin disampaikan Ramadan adalah walaupun agama memiliki ekspresi budaya yang berbeda-beda, namun ia tetap memiliki nilai-nilai yang universal.

Dimensi kedua yang menjadi kendala bagi kehadiran muslim Eropa adalah masalah identitas. Identitas selalu menjadi permasalahan bagi muslim tatkala mereka bersinggungan dengan masyarakat Eropa. Ramadan melihat bahwa identitas bukan sesuatu yang monolitik dan pembentukannya tidak serta-merta berasal dari upaya menegasikan kelompok lain.

Dengan demikian, Ramadan percaya bahwa identitas terbentuk melalui dua cara, pertama identitas yang terbangun atas dasar perbedaan dengan yang lain, kedua identitas yang terbangun atas dasar usaha mencari kesamaan. Agama akan selalu berada dalam koridor prinsip-prinsip fundamental yang tidak bersifat kultural, namun tetap terbuka terhadap hal-hal yang bersifat kultural.

Ramadan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa setiap individu memiliki *multiple identity*. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Amartya Sen, identitas bukanlah sesuatu yang stabil dan mutlak melainkan sesuatu yang relatif dan nisbi di mana setiap individu memiliki preferensi dalam menciptakan kondisi identitasnya. Ramadan berujar "*I am a Muslim by religion, I am a European by culture, I am an Egyptian by memory, I am a Universalist by principle*". Dengan demikian, tidak perlu terjadi pembenturan identitas dan melawankannya antara satu dengan yang lain (Ramadan, 2004).

Dimensi ketiga dari permasalahan muslim Eropa adalah masalah loyalitas. *Citizenship* memerlukan loyalitas dalam beberapa hal. Loyalitas menjadi permasalahan tatkala muslim Eropa selalu memiliki sikap *sense of belonging* yang lebih kuat terhadap *International Ummah* daripada Eropa sendiri. Artinya, loyalitas muslim lebih terarah pada *ummah* yang bersifat transnasional daripada dengan *citizenship* Eropa di mana mereka tinggal ((Ramadan, 2009).

Menurut Ramadan, tingginya loyalitas tidak dapat diukur dari sejauh mana pembelaan buta kita terhadap negara. Loyalitas warga negara kepada negara berlaku tatkala negara tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hati nurani. Begitu pula loyalitas seorang muslim kepada *ummah* tidak bisa dikontradiksikan dengan loyalitas terhadap negara. Loyalitas muslim kepada komunitas muslim secara global adalah loyalitas spiritual. Ia tidak dibangun berdasarkan kepentingan

sebagaimana negara memiliki kepentingan. Loyalitas spiritual ini pun juga berbasiskan kepada nilai-nilai kemanusiaan.

Penting kiranya bagi masyarakat Eropa untuk menumbuhkan *critical loyalty*. Artinya, proses integrasi muslim Eropa tidak serta-merta harus mengasumsikan bahwa mereka harus mengikuti seluruh kultur yang ada di peradaban Eropa. Tidak boleh diasumsikan bahwa kultur yang ada di dalam peradaban Eropa adalah bagus semua. Sebagai contoh, seks bebas yang sudah menjadi kultur di kalangan masyarakat Eropa tidaklah mesti harus dicontoh oleh muslim bila muslim ingin berintegrasi dengan Eropa. Tatkala muslim mengkritik budaya seks bebas ini, tidak dapat pula serta-merta mereka dituduh tidak loyal dan ingin mengubah tatanan sosial masyarakat Eropa. Kritik muslim Eropa terhadap nilai-nilai negatif dari Eropa dilihat sebagai bentuk ketidakloyalan muslim Eropa terhadap ke-Eropa-annya (www.redpepper.org). Padahal loyalitas seharusnya berbasiskan kepada pemahaman kritis akan apa yang kita lakukan. Hal itu bukanlah sinyal ketidakloyalan bila muslim mengkritik budaya seks bebas masyarakat Eropa. Namun, hal ini juga berlaku bagi komunitas Muslim. Muslim harus mampu mempertanyakan tradisi-tradisi yang tidak lagi relevan dengan kondisi dunia modern dan budaya Eropa yang terdapat dalam tradisi-tradisi Islam.

Organizational Platform:

Kemunculan Organisasi Euro-Islam di Eropa

Menurut Finnemore dan Sikkink, setelah *norms entrepreneur* mendiseminasi ide dan norma ke wilayah publik maka promosi norma tersebut akan tersendat bila tidak ada aktor yang mengejawantahkan norma dalam *platform* organisasi mereka (Finnemore & Sikkink, 1998). *Platform* organisasional mutlak dibutuhkan agar promosi terhadap norma terus dapat dilakukan. Norma tidak akan bertahan bila ia hanya berupa wacana dan ide namun ia akan dapat bertahan tatkala ada praktik norma yang dilakukan. Finnemore dan Sikkink mengatakan bahwa praktek norma tersebut dapat dilihat dari adanya *platform* organisasional. *Platform* organisasional ini dapat terejawantahkan oleh *non-governmental organization*. *Platform* organisasional akan menjadi lebih efektif dalam membentuk norma di level internasional bila terdapat jejaring komunikasi yang membentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pada level internasional. Dalam kasus Euro-Islam, maka *platform* organisasional pada level Uni Eropa mutlak diperlukan.

Apa yang diteorikan oleh Finnemore dan Sikkink ini sebenarnya sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Jacques Waardenburg sebagai aktivisme Islam. Menurut Waardenburg, dimensi dari diskursus keislaman yang kritis memiliki tendensi untuk menjadi sebuah aktivisme yang lebih besar dengan partisipasi komunitas yang tinggi. Jadi, diskursus mengenai Islam yang dapat diterapkan dalam masyarakat sekular Eropa, tidak hanya sekedar menjadi wacana belaka, namun telah berubah menjadi aktivisme yang melibatkan

partisipasi muslim Eropa dalam komunitas-komunitas yang berbentuk organisasi-organisasi Islam dan kepemudaan (Waardenburg dalam Shadid & van Koningsveld, 1996). Dengan kata lain, *platform* organisasional adalah sebuah usaha untuk mewujudkan ide menjadi pergerakan.

Jacques Waardenburg (1996) juga melihat, pada paruh pertengahan dekade 1990-an dan usai peristiwa 11 September, pendekatan muslim terhadap masyarakat Eropa lebih dititikberatkan kepada partisipasi aktif muslim di organisasi komunitas daripada agitasi politis sebagaimana generasi pertama muslim. Sekarang mereka tidak akan melihat diri mereka terpisah dari masyarakat yang lebih luas, yakni masyarakat Eropa melainkan merupakan bagian dari *civil society*. Perubahan gaya dalam berpartisipasi aktif dalam masyarakat ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang antipolitik atau nonpolitik, melainkan sebuah cara untuk melihat Islam sebagai sesuatu yang *political* dan bukan *political Islam*.

Dengan adanya niat baik dari otoritas politik di negara-negara Eropa, Muslim Eropa tidak hanya menjadikan Euro-Islam sebagai sebuah wacana belaka melainkan menjadi dimensi konstitutif dalam *European Public Sphere*. Euro-Islam tidak hanya menjadi sebuah diskursus yang kaku melainkan sebuah ruang diskursus yang secara nyata hadir di tengah masyarakat Eropa (Salvatore, 2007).

Beberapa organisasi Muslim Eropa bahkan mencoba mewarnai proses demokrasi dengan menerapkan nilai-nilai sekular republikanisme. Dengan berlandaskan kepada multikulturalisme yang dijamin nilai-nilai sekular republikanisme, organisasi-organisasi muslim Eropa mampu menghadirkan *Islamic Socio-Political Identity* yang dimaknai sebagai basis otonomi budaya dalam mempraktekkan nilai dari *citizenship*. Dengan menghadirkan *Islamic Socio-Political Identity*, masyarakat muslim Eropa mampu menjadi bagian dari Eropa karena dengan adanya *Islamic Socio-Political Identity* dapat mengantarkan muslim Eropa untuk merasakan *political participation* yang berujung kepada *citizenship*. Menurut Cesari, kemunculan gejala ini sebagai fenomena *Islam as a New Form of Citizenship* (Cesari, 2009).

Sebagai bagian dari *civic engagement*, muslim harus secara aktif berpartisipasi dalam menginterpretasikan dan mempraktekkan prinsip-prinsip sekularitas yang menjadi dasar dari nilai-nilai republikanisme Prancis. Dengan demikian, upaya untuk mendefinisikan batas antara ruang agama dan ruang publik sekular tidak saja dilakukan melalui *public critical discourse* belaka melainkan juga melalui keterlibatan praktis dari muslim dalam isu-isu di mana batas antara ruang agama dan ruang publik sekular dapat dinegosiasikan.

Kita menyaksikan bagaimana telah muncul fenomena kebangkitan muslim bukan sebagai individu-individu migran tetapi sebagai sebuah gerakan masyarakat sipil yang terorganisir dan bergerak baik dalam level nasional maupun level supranasional, yakni Uni Eropa. Sebenarnya, Islam

meski sebuah agama transnasional, tidak memiliki institusi resmi yang menaungi dan menjadi organisasi tunggal dalam merepresentasikan Islam. Hal ini cukup menimbulkan permasalahan di Uni Eropa karena susah bagi Uni Eropa untuk berinteraksi dengan komunitas Muslim yang tidak memiliki representasi otoritatif bagi kepentingannya.

Selain itu, komunitas Islam (*Ummah*) di Eropa tidak memiliki satu otoritas tunggal yang merepresentasikan umat. Hal ini membuat *state* tidak mampu melakukan kontrol terhadap komunitas Islam yang tersebar ini. Kurangnya institusi ini memaksa pemimpin EU dan negara-negara Eropa Barat untuk membuat beberapa *muslim council* yang terkesan artifisial (Fetzer & Soper, 2005).

Muslim mulai merambah ruang publik Eropa disekitar tahun 1970-an di mana mulai banyak pembangunan masjid dilakukan di seantero Eropa Barat oleh imigran-imigran muslim generasi pertama yang kebanyakan dibiayai oleh pemerintah negara-negara asal. Masjid-masjid atau *Islamic Center* ini mulai menjadi pusat-pusat budaya serta pembelajaran Islam yang secara berkelanjutan terus menjadikan identitas Muslim Eropa tetap tertanam. Menurut Silvestri, pada model pertama pergerakan ini memiliki karakter *Islam of the States*, *Islamist* dan *Diaspora Networks* (Nielsen dalam Allievi & Nielsen, 2007).

Lalu pada generasi selanjutnya, lahir aktifis-aktifis muslim yang lebih independen dari generasi sebelumnya. Mereka tidak tergantung dengan pembiayaan dari negara asal. Selain itu, secara gradual, komunitas-komunitas muslim semakin bervariasi seiring semakin banyaknya imigran-imigran muslim yang mendatangi Eropa. Generasi inilah yang menjadi pionir bagi kemunculan *platform* organisasional bagi norma Euro-Islam dimana organisasi-organisasi yang lebih baru ini memiliki independensi.

Organisasi Islam yang berada di Eropa melakukan operasi pada dua level, yakni level nasional dan transnasional. Di level nasional, Organisasi Islam dapat bergerak secara lokal berbasiskan di kota-kota besar atau bermain pada level nasional dengan melakukan advokasi pada tingkat pemerintahan. Pada level transnasional, gerakan-gerakan Islam bergerak dengan berbasiskan jaringan yang mereka punya baik di negara-negara anggota Uni Eropa atau di luar Uni Eropa.

Munculnya organisasi Muslim yang bersifat transnasional seperti *Federation of Islamic Organization in Europe* (FIOE), *Federation of European Muslim Youth Student Organization* (FEMYSO), dan *European Muslim Network* (EMN) ini memunculkan sebuah pemahaman bagi komunitas muslim akan pergerakan mereka yang luas. Institusi dan organisasi tidak hanya diartikan secara tradisional yakni masjid dan sekolah-sekolah tetapi sebuah gerakan transnasional yang mampu menjadi *pressure group* dan grup lobi bagi kebijakan-kebijakan pada level nasional dan Uni Eropa. Organisasi-organisasi muslim ini menjadi garda terdepan dalam melakukan promosi norma baik

pada level nasional maupun Uni Eropa.

Penulis mengklasifikasikan ketiga organisasi ini sebagai organisasi yang mempromosikan *Euro-Islam Norm* dengan tiga indikator. Pertama, Indikator isu yang mereka angkat yakni usaha menggabungkan nilai-nilai Eropa dengan nilai-nilai Islam. Kedua, Jejaring internasionalnya yang meliputi seluruh Eropa. Ketiga Uni Eropa sebagai *level of playing field*.

Pengejawantahan norma Euro-Islam sangat kentara dalam program-program serta aktivitas yang dilakukan oleh FEMYSO. Organisasi ini memfokuskan aktivitas mereka di tiga area besar yakni pemberdayaan warga negara, *interreligious and intercultural dialogue*, *human rights* dan *Islamophobia*. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan media dan komunikasi juga bagian dari program tersebut untuk meningkatkan proses dialog antara masyarakat muslim dengan masyarakat nonmuslim di Eropa.

FEMYSO adalah organisasi pemuda muslim pertama yang didirikan dan memiliki jejaring yang tersebar di seluruh Eropa. Pemuda-pemuda muslim yang tergabung dalam FEMYSO adalah pemuda-pemuda yang memiliki perbedaan budaya serta etnis. Namun, mereka memiliki persamaan yakni merasa menjadi bagian dari Eropa.

Tabel 2. Platform Organisasi FEMYSO

<i>Organisational Platform</i>	Program-Program terkait Euro-Islam
FEMYSO juga meyakini nilai-nilai dasar Eropa seperti <i>Individual liberty</i> , <i>Religious liberty</i> (baik secara individu, komunitas, maupun institusi), dan <i>Human rights</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Intercultural Dialogue</i> dan <i>interreligious Dialogue</i>. • Program pemberdayaan pemuda Muslim. • Advokasi kepada pengambil kebijakan terkait dengan permasalahan muslim.
FEMYSO Mendukung sekularisme.	
FEMSO percaya Islam merupakan bagian terpenting dari sejarah panjang peradaban Eropa	
FEMYSO percaya kepada nilai-nilai keadilan dan persamaan antara pria dan wanita	
FEMYSO percaya integrasi Islam dengan Uni Eropa didasar atas kesamaan nilai-nilai dasar antara Islam dan Eropa	

Selain FEMYSO, *European Muslim Network* adalah organisasi yang juga mengedepankan usaha-usaha untuk menciptakan harmoni antara masyarakat muslim dengan masyarakat Eropa. Berbeda dengan FEMYSO, *European Muslim Network* lebih merupakan organisasi yang menjadi *think thank group* di mana intelektual muslim dan aktivis muslim Eropa berkumpul

bersama membahas permasalahan terkait dengan muslim di Eropa. Tujuan dari didirikannya organisasi yang bersifat jejaring ini adalah menumbuhkan komunikasi yang setara dan analisa-analisa yang tidak bias, terkait dengan kehadiran muslim di Eropa.

Pada level nasional dan Uni Eropa, EMN didisain untuk memberikan ruang diskusi dan analisis di mana hasil dari itu semua dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kehadiran muslim di Eropa. Pada level akar rumput, EMN menitikberatkan kepada kontribusi nyata mereka dalam melakukan pendidikan serta penyadaran mengenai hakikat ajaran Islam yang sejalan dengan nilai-nilai Eropa(euro-muslim.eu).

Keanggotaan EMN memang masih terbatas pada kalangan intelektual saja namun area penyebarannya merata di seluruh negara Eropa mulai dari Prancis, Belgia, Inggris, Portugal, Spanyol, Denmark, Norwegia, Italia, Austria, Belanda, Jerman, Bosnia, Masedonia, Turki, Swedia, dan Irlandia. Intelektual EMN tentu yang paling terkenal adalah Tariq Ramadan. Selain Ramadan, terdapat sejumlah intelektual-intelektual muslim Eropa yang memiliki kontribusi nyata terhadap perkembangan hubungan Islam dan Eropa dalam disiplin ilmu mereka masing-masing. Diantara intelektual-intelektual tersebut terdapat Abdelmumin Aya dari Spanyol, Abdool Magid Abdool Karim Wakil dari Portugal, Ahmet Alibasic, M.A. dari Bosnia, Batool Al-Toma dari Inggris dan lain-lain. Kepengurusan *European Muslim Network* tidaklah banyak. Selain memiliki representatif di setiap kota di Eropa, EMN hanya memiliki Presiden, Wakil Presiden, dan Sekretaris Jendral. Presiden EMN sendiri tak lain adalah Tariq Ramadan, Wakil Presiden EMN adalah Malika Hamidi dari Prancis dan Belal El Mogaddedi dari Jerman, serta Maima Boteldja dari Inggris sebagai Sekretaris Jenderal (euro-muslim.eu).

European Muslim Network setidaknya memiliki lima visi. Pertama, EMN berusaha mengelaborasi solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi muslim Eropa terkait dengan permasalahan sosial, politik dan budaya. Kedua, EMN aktif dalam proses mendidik muslim Eropa agar dapat berpartisipasi lebih aktif dalam permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungan mereka. Ketiga, EMN juga berkomitmen untuk terus menumbuhkembangkan komunikasi yang terbuka antara muslim dan nonmuslim maupun antara komunitas muslim Eropa dengan masyarakat Eropa yang lebih luas serta para pengambil kebijakan di Uni Eropa dan negara-negara Eropa. Keempat, EMN secara aktif mengembangkan forum-forum akademis untuk membahas mengenai permasalahan kontemporer Islam di Eropa. Kelima, terlibat aktif dalam perdebatan-perdebatan publik dengan memproduksi teks dan mendistribusikan informasi (euro-muslim.eu).

Tabel 3. Platform Organisasi EMN

Platform Organisasional	Program-program
EMN memperjuangkan nilai-nilai Eropa dan mengkontekstualisasikan nilai Islam ke dalam kultur masyarakat Eropa.	<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan puluhan penelitian-penelitian berkualitas yang bertujuan praktikal serta menghasilkan rekomendasi-rekomendasi praktis untuk pengambil kebijakan di level lokal, nasional, maupun Uni Eropa. • Mengadakan puluhan seminar dan simposium dengan output rekomendasi bagi pengambil kebijakan di Eropa. • Mengadakan Pelatihan-pelatihan ini ditujukan untuk organisasi-organisasi Muslim maupun nonmuslim agar dapat mendapatkan pengetahuan dan pemahaman akan muslim dan Eropa
EMN aktif dalam proses mendidik muslim Eropa agar dapat berpartisipasi lebih aktif dalam permasalahan-permasalahan sosial yang ada dilingkungan mereka	
EMN juga berkomitmen untuk terus menumbuhkembangkan komunikasi yang terbuka antara Muslim dan nonmuslim maupun antara komunitas muslim Eropa dengan masyarakat Eropa yang lebih luas serta para pengambil kebijakan di Uni Eropa dan negara-negara Eropa	

Federation of Islamic Organization in Europe atau biasa disingkat FIOE adalah sebuah organisasi payung nirlaba yang didirikan pada tahun 1989. Meski demikian, aktivitasnya mulai terlihat di pertengahan tahun 1990-an. Organisasi ini menjadi wadah persatuan sejumlah organisasi dan institusi Islam di 26 negara Eropa. Setidaknya terdapat 29 organisasi Muslim Sunni dan lebih dari 1000 organisasi lokal yang tersebar di negara-negara Eropa masuk menjadi anggota FIOE. Organisasi ini bukanlah organisasi yang kecil. Anggaran tahunan FIOE sendiri mencapai 400.000 Euro yang berasal dari para anggota dan donatur (www.eu-islam.com).

FIOE sendiri menyatakan tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam dalam kerangka kebudayaan Eropa yang unik. FIOE mencoba mencari jalan tengah bagaimana Islam dapat diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Eropa. FIOE sendiri memiliki prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi FIOE untuk menjalankan aktifitasnya. Prinsip-prinsip inilah yang membuat peneliti mengategorikan FIOE sebagai organisasi yang memiliki *platform* organisasional Euro-Islam. Beberapa prinsip FIOE dapat disimpulkan seperti dibawah ini.

FIOE percaya bahwa Islam memiliki cara pandang yang holistik dalam melihat dunia, sehingga Islam datang untuk membebaskan manusia dari kungkungan ketidakadilan dan penindasan akibat kebodohan. Oleh sebab itu Islam memiliki semangat yang sama dengan semangat pencerahan Eropa. FIOE sendiri melihat sistem pendidikan yang holistik adalah jawaban bagi permasalahan-permasalahan yang ada di tengah muslim Eropa.

FIOE tidak setuju akan pemaksaan serta kekerasan dalam melakukan dialog serta komunikasi antarumat baragama. FIOE menekankan pentingnya

dialog sebagai jembatan untuk menghubungkan antara dua prinsip yang berbeda. FIOE juga berusaha untuk menciptakan sebuah pemahaman di kalangan Muslim sendiri bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat Eropa dan masyarakat dunia yang memiliki tugas untuk menciptakan kebaikan bersama bagi umat manusia. FIOE percaya dengan nilai-nilai humanisme, kebebasan, serta persamaan yang juga menjadi nilai dasar dari Eropa. Dengan demikian, FIOE percaya bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara Islam dan Eropa. Oleh sebab itu, FIOE juga berjuang untuk melakukan integrasi muslim terhadap masyarakat Eropa.

Dari semua tujuan FIOE, tujuan paling penting dari berdirinya FIOE adalah melakukan koordinasi dan konsolidasi terhadap seluruh organisasi-organisasi Islam pada level nasional maupun pada level lokal, sehingga terbentuk jejaring transnasional di level Uni Eropa yang mampu membuat organisasi-organisasi Islam ini memiliki kekuatan yang mampu merepresentasikan Islam di tingkat Uni Eropa.

Tabel 4. Karakteristik Organisasi-organisasi Euro-Islam

Karakteristik	FEMYSO	FIOE	EMN
Agenda Euro-Islam	Menyelaraskan nilai kehidupan pemuda muslim dengan masyarakat Eropa	Pendidikan untuk pemahaman nilai-nilai Euro-Islam (harmoni antara nilai Barat dan Islam)	Agar gagasan Euro-Islam terimplementasikan kedalam kebijakan negara Eropa dan Uni Eropa
Bentuk Organisasi	Forum	Federasi (organisasi payung)	<i>Network</i> (jejaring)
Target	Pemuda muslim Eropa	Masyarakat muslim Eropa secara umum	Jejaring intelektual muslim se-Eropa
Metodologi	Pemberdayaan pemuda muslim dan penyebaran Euro-Islam melalui	Penyebaran Euro-Islam ke kalangan muslim Eropa melalui lembaga-lembaga formal dan dakwah.	Memberikan analisa-analisa serta penelitian yang dapat menjadi acuan untuk pengambilan kebijakan terkait dengan keberadaan muslim Eropa

Salah satu aspek terpenting dari aktifitas yang dilakukan ketiga organisasi Euro-Islam di atas adalah *level of playing field* mereka yang berada di level Uni Eropa. Selama ini, organisasi-organisasi yang bersifat *top down* dan didanai dari negara asal serta beroperasi secara nasional lebih memiliki karakteristik cenderung menutup diri dari pergaulan dengan masyarakat. Beberapa organisasi hanyalah kepanjangan tangan dari negara-negara asal para imigran Muslim dan beberapa organisasi didanai oleh negara-negara teluk, seperti Arab Saudi. Hal ini tentu membuat organisasi-organisasi ini menjadi organisasi yang memiliki kepentingan tersendiri terlepas dari kepentingan membentuk *Euro-Islam Norm* yang mengedepankan perpaduan nilai-nilai Eropa dengan prinsip Islam. Organisasi seperti UOIF- *the Union*

of Islamic Organisations of France (*Union des Organisations Islamiques de France*) adalah organisasi Islam yang didanai oleh Aljazair begitu juga FNMF (*Fédération Nationale des Musulmans de France*) yang didanai oleh pemerintah Maroko adalah beberapa contohnya (Bowen, 2003).

Berbeda dengan organisasi-organisasi diatas, Organisasi seperti FEMYSO, FIOE, dan EMN adalah organisasi yang bermain pada level Uni Eropa melalui jejaring mereka yang ada di setiap negara. Selain itu advokasi yang mereka lakukan langsung ditujukan kepada para pengambil keputusan di Uni Eropa, baik melalui lobi maupun dialog.

Bila dilihat dari karakteristik-karakteristik organisasi Islam yang mencoba menyebarkan norma Euro-Islam, maka terlihat, organisasi-organisasi yang memiliki *organizational platform* yang bermain pada level nasional belum mampu mengejawantahkan norma Euro-Islam sebagaimana organisasi-organisasi yang bermain pada level Uni Eropa. Dari sisi para pengambil kebijakan, Uni Eropa jauh lebih mengakomodasi usaha integrasi muslim ke dalam masyarakat Eropa daripada negara nasional, sehingga pembentukan Euro-Islam lebih banyak disokong dan didukung oleh Uni Eropa. Dalam teori *norms life cycle*, Uni Eropa menjadi aktor yang menandai terjadinya *tipping point* bagi proses pembentukan identitas Euro-Islam. Hal ini tentu ada jawaban mengapa Uni Eropa lebih akomodatif terhadap upaya penyebaran norma Euro-Islam yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam.

Tipping Point:

Critical Actor (UE) yang mendukung Norma Euro-Islam

Menurut Finnemore dan Sikkink, tatkala norma sudah mulai diterima oleh orang banyak, tidak serta-merta norma tersebut dapat berkembang di masyarakat. Harus ada *critical actor* yang menjadi penentu bagi perkembangan norma yang stabil, sehingga tahap pembentukan norma dapat bergerak ke tahap selanjutnya. Menurut Finnemore dan Sikkink, norma akan diterima bila sepertiga lebih dari negara-negara pada level internasional menerima norma tersebut. Namun dalam kasus pembentukan norma Euro-Islam, *critical actor* untuk mendukung keberadaan norma tidaklah mesti sepertiga dari jumlah negara-negara di Eropa. *Critical actor* dalam pembentukan norma Euro-Islam di Eropa tidak lain adalah Uni Eropa. Dukungan Uni Eropa menjadi tahap *tipping point* bagi pembentukan norma Euro-Islam di mana dengan dukungannya, proses pembentukan norma Euro-Islam menjadi lebih cepat (Finnemore & Sikkink, 1998).

Penulis melihat bahwa Uni Eropa merupakan aktor penting dalam usaha pembentukan Euro-Islam. Hal ini disebabkan oleh mekanisme yang berlaku di Uni Eropa lebih akomodatif terhadap usaha-usaha ini, sehingga norma Euro-Islam dapat lebih menguat. Menurut Melissa Ann Parker, hal ini disebabkan oleh karakter dari struktur Uni Eropa yang bersifat multilevel.

Karakteristik struktur multilevel Uni Eropa antara lain adalah *supranational level*, *national level*, dan *sub-national level*. Dengan adanya multilevel ini, setiap keluhan yang dikemukakan oleh *interest group* yang ada di Uni Eropa dapat disampaikan langsung ke Uni Eropa. Keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan audiensi antara *interest group* dengan Uni Eropa meskipun tidak langsung diterapkan oleh negara-negara Uni Eropa namun mampu memberikan pilihan-pilihan bagi pengambil kebijakan domestik. Hal inilah yang membuat organisasi-organisasi Islam lebih memilih bermain pada level Uni Eropa daripada level nasional di masing-masing negara. Dengan demikian, Uni Eropa dapat menjadi mitra strategis bagi organisasi-organisasi Islam yang memiliki kepentingan dalam melawan negara nasional mereka yang tidak responsif dalam menjawab keluhan-keluhan organisasi-organisasi ini.

Pertanyaan yang muncul, kenapa organisasi-organisasi Islam lebih memilih melakukan advokasi kebijakan melalui Uni Eropa daripada langsung melakukan advokasi ke negara-negara masing-masing? Jawabannya adalah tingginya tingkat kegagalan yang didera oleh organisasi-organisasi Islam tatkala mereka mencoba melakukan advokasi kebijakan pada level nasional.

Menurut Mellissa Anne Parker, setidaknya ada tiga alasan mengapa pada level nasional, tingkat kegagalan dalam melakukan advokasi kebijakan yang dilakukan organisasi Islam tinggi. Pertama organisasi Muslim mendapatkan tekanan tinggi secara sosio-ekonomi dan agama Islam termarginalisasi di beberapa negara. Di Jerman, Prancis, dan Inggris, komunitas-komunitas Islam masih harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan dasar berupa pemenuhan kehidupan sehari-hari mereka dan keamanan diri mereka sehingga organisasi-organisasi Islam yang merepresentasikan komunitas-komunitas ini, masih belum dapat berbuat banyak dalam melakukan advokasi-advokasi kebijakan (Parker, 2007).

Kedua, parameter apa yang harus dilakukan oleh organisasi Islam yang ikut serta dalam aktivitas publik sepenuhnya didefinisikan oleh negara? Bagaimana muslim harus berinteraksi dengan negara dan prosedur apa yang harus dijalankan sepenuhnya diatur oleh negara? Terkadang aturan dan definisi ini membuat aktivitas organisasi Islam menjadi sangat terbatas. Di beberapa negara, bahkan Islam masih belum diakui sebagai agama. Hal ini terjadi di Jerman. Di Jerman terdapat hukum yang membedakan antara agama yang diakui negara dan agama yang tidak diakui. Islam meski menjadi agama mayoritas kedua tetap belum diakui sebagai agama resmi. Hal ini menyebabkan advokasi-advokasi organisasi Islam tidak begitu berpengaruh terhadap pengambil kebijakan karena tidak adanya saluran-saluran resmi untuk berkomunikasi, karena komunitas-komunitas Islam sering dianggap oleh pemerintah sebagai perpanjangan tangan negara lain seperti Turki (www.muslimnews.co.uk).² Begitu juga di Prancis di mana organisasi-

2 Diakses dari <http://www.muslimnews.co.uk/news/news.php?article=17655>

organisasi Islam masih belum mendapatkan akses untuk melakukan advokasi karena Prancis mensyaratkan sebuah kesatuan tunggal organisasi untuk merepresentasikan Islam sebagai mitra negara. Namun kenyataannya hal tersebut mustahil untuk dilakukan karena organisasi Islam di Prancis terpecah-pecah (Sebian, 2009). Di kedua negara ini, sulit bagi organisasi Islam untuk berinteraksi dan melakukan advokasi pada level negara nasional.

Yang terakhir, kekuatan yang dimiliki oleh organisasi-organisasi Islam sangat terbatas di dalam negara nasional, sehingga sumber daya yang mereka miliki pun juga sangat terbatas. Pada level nasional, organisasi-organisasi Islam yang ada di negara-negara Uni Eropa belumlah dianggap sebagai aktor nasional. Hal inilah yang membuat organisasi Islam memiliki kesempatan untuk melihat Uni Eropa sebagai *level of playing field* untuk memperjuangkan aspirasi dalam rangka integrasi muslim ke dalam masyarakat Eropa.

Uni Eropa sebagaimana disebutkan oleh Riva Kastoryano merupakan sebuah panggung baru bagi organisasi Islam untuk melakukan advokasi kebijakan, karena organisasi Islam lebih mudah untuk melakukan advokasi pada level Uni Eropa. Mereka pun harus bekerja sama dan membentuk solidaritas antarorganisasi-organisasi Islam di setiap negara-negara Uni Eropa. Lebih lanjut, hal ini membuahkan *transnational organization* yang memiliki *platform* serta agenda perjuangan yang sama (Kastoryano, 2002).

Uni Eropa menurut hemat penulis, menjadi semacam katalisator bagi proses pembentukan norma Euro-Islam. Disadari atau tidak, adanya level Uni Eropa merupakan sebuah pijakan dasar bagi komunitas Muslim Eropa untuk membentuk sebuah norma yang sama berdasarkan atas nilai-nilai Eropa, tanpa memandang batas negara dan sekat etnis. Menurut pendapat peneliti, setidaknya terdapat dua alasan mengapa Uni Eropa merupakan *critical actor* bagi proses pembentukan norma Euro Islam. Pertama, Uni Eropa menumbuhkan aliansi *Transnational Islam*; dan kedua, Uni Eropa memunculkan ruang bagi *Transnasional Ummah*.

Uni Eropa menumbuhkan aliansi *Transnational Islam*

Institusi Uni Eropa merupakan bagian terpenting dalam menumbuhkan aliansi dan kerja sama lintas negara yang dilakukan oleh organisasi-organisasi muslim Eropa. Semenjak tahun 1986, Parlemen Eropa (waktu itu) sudah memberikan dana bagi asosiasi-asosiasi imigran di mana tentu yang paling banyak adalah imigran muslim. Sampai sekarang, Uni Eropa masih tetap memberikan dana kepada organisasi-organisasi Islam. Dengan memberikan dana kepada organisasi-organisasi Islam, Uni Eropa telah mendukung pembentukan organisasi payung yang mewadahi organisasi-organisasi Islam yang ada di negara-negara Uni Eropa.

Selain itu, sudah watak dari Uni Eropa untuk mengurus permasalahan-permasalahan yang bersifat *low politics* di luar permasalahan keamanan. Tidak heran bila permasalahan imigran dan hak-hak minoritas menjadi isu

yang paling sering diangkat oleh Uni Eropa di mana negara-negara anggota selalu bersikap pasif untuk masalah-masalah seperti ini.

Interaksi antara Uni Eropa dan Organisasi Islam

Interaksi antara Uni Eropa dengan organisasi Islam transnasional membuat terbangunnya sebuah kesadaran dari organisasi-organisasi Islam bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam melakukan negosiasi dengan Uni Eropa mereka harus bersatu. Dengan keberadaan Uni Eropa, komunitas-komunitas Muslim yang ada di berbagai negara anggota Uni Eropa menyadari bahwa keberadaan Uni Eropa memberikan ruang gerak bagi mereka untuk melakukan advokasi-advokasi yang tidak selesai pada level nasional (Byers, 2005). Untuk itu, mereka harus membuat jejaring organisasi yang juga berada pada level Uni Eropa.

Alhasil, keberadaan Uni Eropa juga membuat terbentuknya kesadaran akan pentingnya organisasi Islam Transnasional yang beroperasi di level Uni Eropa. Hal ini diperlukan karena dengan membuat organisasi formal pada level Uni Eropa, masyarakat muslim Eropa dapat langsung melakukan advokasi terhadap Uni Eropa (Parker, 2007).

Keberadaan organisasi formal pada level Uni Eropa menjadi kekuatan yang signifikan bagi komunitas Muslim Eropa. Peran organisasi formal Islam pada level Uni Eropa bukan saja berfungsi sebagai organisasi terstruktur bagi komunitas muslim tetapi juga sebagai kerangka strategis bagi institusionalisasi Islam dalam pengambilan kebijakan pada level Uni Eropa.

Menurut analisis Melissa Anne Parker, interaksi formal antara Uni Eropa dengan organisasi Islam di Eropa menghasilkan dampak bagi perkembangan norma Euro-Islam dalam masyarakat muslim Eropa. Lebih jauh lagi, keberadaan norma Euro-Islam mau tidak mau akan bertumbuh dan berkembang karena masyarakat muslim di Eropa terus mengorganisir diri mereka dalam jejaring organisasi transnasional agar dapat menyesuaikan diri dengan format struktur Uni Eropa di mana tempat masyarakat muslim melakukan lobi untuk kepentingan. Untuk membentuk jejaring internasional, mereka harus memiliki kesamaan *platform* dalam perjuangan sehingga mau tidak mau arah untuk membentuk kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama ini menumbuhkembangkan norma Euro-Islam (Parker, 2008).

Norma Euro-Islam dan Uni Eropa

Dari uraian diatas, penulis melakukan pemetaan terhadap proses pembentukan identitas Uni Eropa. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan bahwa proses pembentukan norma lebih dipengaruhi oleh interaksi antara organisasi-organisasi Islam dengan Uni Eropa. Dari proses pembentukan tersebut, setidaknya ada tiga perubahan dalam usaha komunitas muslim berintegrasi dengan Eropa yang membuat arah pembentukan *Euro-Islam Norm* semakin jelas. Pertama adalah perubahan dalam strategi. Kedua, perubahan

isu yang diangkat. Ketiga, perubahan retorika. Ketiga perubahan ini semakin menguatkan proses pembentukan norma Euro-Islam.

Pertama, ada perubahan yang jelas dalam strategi. Strategi lobi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam lebih menitikberatkan kepada mekanisme-mekanisme yang ada di Uni Eropa. Dengan memperluas arena negosiasi dengan naik ke level yang lebih tinggi dari negara, organisasi-organisasi Islam mampu membentuk jejaring yang mampu mengumpulkan muslim Eropa dalam satu kesatuan *platform* organisasional yang sama. Bila setiap organisasi melakukan lobi terhadap negara nasionalnya, maka kesatuan *platform* organisasional seluruh organisasi Islam di Eropa tidak akan pernah terbentuk. Namun dengan adanya usaha pada level Uni Eropa, kesatuan *platform* ini dapat terwujud.

Perubahan strategi terlihat tidak hanya dalam strategi dan lobi, tetapi juga strategi dalam menghimpun dan membangun jejaring. Organisasi-organisasi Islam yang selama ini berbasiskan kepada etnisitas, mampu bekerja sama dalam satu *platform* umum yang disepakati. Strategi yang diangkat untuk menghimpun persaudaraan sesama Muslim pun akhirnya tidak lagi berdasarkan etnisitas yang selama ini menjadi mitos dalam pengorganisasian dan mobilisasi komunitas muslim.

Kedua, ada perubahan dalam pengambilan isu yang diperjuangkan oleh organisasi-organisasi Islam. Organisasi-organisasi Islam selama ini selalu berbicara dalam konteks negara-negara nasional serta menghabiskan waktu untuk melobi untuk urusan seperti rasisme, kekerasan, dan diskriminasi. Namun semenjak interaksi Uni Eropa dengan organisasi-organisasi Islam terbentuk, isu-isu domestik berubah menjadi isu-isu yang ditangani oleh Uni Eropa seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Komunitas muslim dan organisasi Islam melihat bahwa mereka adalah bagian terpenting dari komunitas Eropa secara umum dan bukan lagi bagian dari negara nasional. Perubahan isu ini menunjukkan komunitas muslim tidak lagi melihat negara sebagai subjek kesetiaan. Mereka lebih merasa sebagai orang Eropa.

Ketiga, ada perubahan dalam retorika yang digunakan organisasi Islam dalam wacana-wacana yang mereka lontarkan baik dalam bentuk lisan maupun publikasi tulisan. Sebelumnya, wacana-wacana yang ditelurkan oleh organisasi-organisasi Islam di Eropa biasanya lebih mengedepankan kepada usaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam komunitas-komunitas muslim. Namun sekarang, retorika yang dibawa menyatakan bahwa kerja sama dengan sesama masyarakat Eropa untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Eropa secara umum lebih banyak dilontarkan oleh organisasi-organisasi Islam di Eropa. Retorika yang berubah ini memperlihatkan bagaimana elit dan pemimpin organisasi Islam lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat Eropa dibandingkan dengan memperjuangkan kepentingan komunitas muslim. Hal ini tentu menggambarkan bagaimana pandangan organisasi

Islam yang selama ini memosisikan diri berada di luar masyarakat Eropa mulai berubah dan mengarah kepada pandangan bahwa masyarakat muslim Eropa adalah bagian dari Eropa. Konsekuensinya tentu semua permasalahan masyarakat Eropa menjadi permasalahan yang harus juga diselesaikan oleh komunitas muslim Eropa.

Norms Cascade:

Peran Network of Organizational Platform Melobi Uni Eropa

Menurut Finnemore dan Sikkink, setelah melalui tahap *tipping point* maka norma akan menuju tahap selanjutnya yakni *norms cascade* yang merupakan kondisi di mana norma mulai diterima oleh masyarakat atau negara nasional yang menjadi tempat norma itu terbentuk. Faktor yang menjadi penting dalam proses *norms cascade* adalah *international socialization* (Finnemore & Sikkink, 1998).

International socialization tidak harus dilakukan oleh negara melalui instrumen diplomasi yang digunakan melainkan juga dapat dilakukan oleh aktor-aktor nonnegara seperti organisasi-organisasi internasional yang membentuk apa yang disebut Finnemore dan Sikkink sebagai *networks of norm entrepreneurs*. Dalam kasus pembentukan norma Euro-Islam, organisasi-organisasi internasional yang bermain di level Uni Eropa seperti FEMYSO, FIOE, dan EMN telah menjadi *networks of organizational platform* yang menyebarkan norma Euro-Islam. Ketiga organisasi tersebut kemudian bertindak sebagai *agents of socialization* melalui instrumen lobi serta advokasi kepada aktor-aktor yang menjadi target mereka, agar terdapat kebijakan-kebijakan baru yang mendukung norma Euro-Islam yang masih dalam proses pembentukan.

Beberapa advokasi terkait dengan kebijakan-kebijakan baru atas norma Euro-Islam adalah keluarnya kebijakan-kebijakan Uni Eropa terkait dengan imigrasi, kohesi sosial, budaya, dan antidiskriminasi. Kebijakan-kebijakan ini walaupun belum memuaskan bagi seluruh komunitas muslim, namun setidaknya menguntungkan komunitas muslim di Eropa dalam proses integrasi ke dalam masyarakat Eropa (Finnemore & Sikkink, 1998).

Belum lagi secara institusional, Uni Eropa semakin tertarik dengan permasalahan integrasi Muslim terhadap masyarakat Eropa. Hal ini dapat kita lihat dari inisiatif-inisiatif Uni Eropa untuk membuat lembaga pada level Uni Eropa untuk mengurus masalah Islam. Salah satu dari inisiatif awal ini adalah *Forward Studies Unit* (FSU) yang dibuat oleh Komisi Eropa. Pada tahun 2001, Salah satu inisiatif dari FSU adalah mendirikan *Group of Policy Advisers* (GOPA) yang kelak bertransformasi menjadi *Board of Policy Advisers* (BEPA). GOPA sendiri adalah semacam *think-tank* bagi Uni Eropa yang berisikan seluruh representasi dari berbagai organisasi termasuk organisasi keagamaan di Eropa mulai dari Kristen, katolik, Yahudi, Hindu, dan Islam. FEMYSO adalah representasi dari organisasi Muslim dalam BEPA. Selain Komisi

Eropa, Parlemen Eropa juga sangat menaruh minat dalam penyelesaian permasalahan integrasi muslim di Eropa (Allievi dalam Marechal, Allievi, Dassetto & Nielsen, 2003). Masuknya FEMYSO ke dalam BEPA menandakan semakin terinstitusionalisasikannya *agent of norm* Euro-Islam ke dalam Uni Eropa.

BEPA kemudian menjadi lembaga di bawah Komisi Eropa yang mengoordinasikan segala bentuk kebijakan terkait dengan isu-isu hubungan antara negara, gereja, dan lembaga-lembaga agama lainnya. Beberapa proyek yang dikoordinasikan oleh BEPA adalah proyek yang dilakukan oleh AEGEE yang mencoba menyebarkan ide Euro-Islam melalui *Euro-Islam project*. AEGEE adalah semacam asosiasi pemuda seluruh Eropa yang kegiatannya disponsori oleh Uni Eropa. Proyek yang paling mendapat sorotan dari AEGEE adalah *Euro-Islam project*. *Euro-Islam Project* merupakan proyek yang mencoba membangun landasan teoretis dan praktikal bagi terbentuknya norma Euro-Islam. Dengan demikian, tidak hanya komunitas Muslim yang memiliki kepentingan dalam pembangunan norma Euro-Islam, tetapi masyarakat Eropa secara keseluruhan pun mencoba memberikan kontribusi bagi pembentukan norma Euro-Islam.

BEPA dapat kita katakan sebagai bagian dari instrumen dari kebijakan Uni Eropa terhadap Islam. Meski pada awalnya, kebijakan Uni Eropa terhadap Islam masih bersifat sporadik dan tidak tersistematis, namun berkat adanya BEPA sebagai instrumen kebijakan Uni Eropa, kebijakan Uni Eropa terhadap Islam semakin tersistematis dan terformalisasi. Tidak hanya berhenti sampai di situ, Uni Eropa juga memfasilitasi keikutsertaan warga negara serta organisasi-organisasi yang merepresentasikan keagamaan untuk turut serta dalam membuat kebijakan melalui mekanisme konsultasi sebagai upaya membangun sisi akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan, di mana grup lobi dan organisasi-organisasi Islam dapat memainkan peran mereka.

Terlihat dari penjelasan di atas bahwa dari seluruh institusi yang terdapat di Uni Eropa, adalah Komisi Eropa yang benar-benar menjadi promotor untuk menginstitusionalisasikan kehadiran Islam dalam setiap kebijakan-kebijakan Uni Eropa melalui BEPA. Selain BEPA, FSU juga mendirikan badan representatif untuk muslim pada level Eropa. Badan representatif ini diberi nama *Muslim Council of Cooperation in Europe* (MCCE). MCCE menjadi dewan sentral bagi Muslim karena melalui MCCE terdapat peluang bagi organisasi-organisasi Muslim untuk mengekspresikan diri mereka sebagai bagian dari *transnational ummah* Eropa. MCCE yang didirikan oleh FSU ini akhirnya menjadi jejaring organisasi-organisasi Muslim di level nasional dan di level lokal. Hal ini semakin memperkuat usaha untuk melakukan sosialisasi terhadap norma Euro-Islam.

Meski terkesan separadis dan tidak sistematis, inisiatif-inisiatif yang dilakukan Uni Eropa secara konstan dan berkelanjutan memperlihatkan bahwa Islam menjadi fokus yang penting bagi Uni Eropa. Bila kita lihat

lebih dekat, program-program serta inisiatif yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap isu-isu yang berkaitan dengan muslim memperlihatkan sebuah pola yang konsisten. Beberapa pengamat melihat pola ini dapat disebut dengan *Policy toward Islam* atau kebijakan Uni Eropa terhadap Islam. Kata *policy* memang terlalu berlebihan karena kata tersebut berarti sebuah tindakan yang sistematis dan koheren sedangkan pada kenyataannya inisiatif-inisiatif Uni Eropa tersebut masih terkesan *unintended* dan sangat reflektif.

Kebijakan-kebijakan Uni Eropa terhadap upaya integrasi Muslim ke dalam masyarakat Eropa semakin gencar terutama dalam membangun dialog antarkepercayaan dan antarperadaban (*Interfaith dialogue and civilization*). Kebijakan-kebijakan ini tersusun lebih disebabkan respon pragmatis dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi seperti peristiwa 11 September, pemboman Madrid dan London pada tahun 2004 dan 2005. Usai pemboman London, kebijakan Uni Eropa terhadap Islam menjadi semakin tersistematis. Uni Eropa mulai melihat pentingnya membangun norma Euro-Islam yang dapat di terima oleh komunitas Eropa serta mampu mengintegrasikan muslim ke dalam masyarakat Eropa.

Kesimpulan

Identitas Eropa sedang diuji. Setelah ratusan tahun terperangkap dalam kondisi yang selalu dilanda perang, Eropa menemukan stabilitasnya setelah Perang Dunia usai. Identitas yang selama ini terfragmentasi oleh konsep *nation-states* menjadi menyatu dengan berdirinya Uni Eropa yang menjadi simbol dari institusionalisasi identitas Eropa. Namun pada saat bersamaan dengan tumbuhnya identitas Eropa, kehadiran imigran muslim lambat laun membuat Eropa mempertanyakan ulang identitasnya. Kehadiran muslim yang pada awalnya hanyalah imigran lambat laun bertransformasi menjadi bagian dari Eropa.

Kehadiran muslim di Eropa muncul akibat cepatnya persinggungan ini terjadi. Setelah lebih dari lima ratus tahun muslim tidak pernah menjadi bagian dari Eropa, mereka sekarang telah berada di pusat-pusat peradaban Eropa dengan kultur dan identitas yang mereka bawa sendiri. Tentu ini memerlukan waktu yang cepat untuk berintegrasi secara natural.

Proses integrasi harus dilakukan untuk menghindari benturan antarbudaya atau, dalam bahasa Huntington, benturan antarperadaban. Euro-Islam sebagai norma mampu menjadi jawaban bagi kebuntuan akan benturan ini. Euro-Islam yang berbasiskan kepada rasionalisme Andalusia menjadi jalan tengah bagi identitas masyarakat muslim yang ada di Eropa. Mampukah Eropa menerima identitas ini? Jawabannya tentu saja, ya.

Ide mengenai Eropa sendiri dari zaman ke zaman selalu berubah-ubah. Pada awalnya Eropa merupakan penamaan orang-orang Yunani terhadap kebudayaan di utara Yunani. Ekspansi Yunani ke Semenanjung Balkan dan Asia Minor membuat konsep Eropa semakin berkembang. Eropa tak

lain adalah peradaban Yunani. Seiring dengan munculnya Romawi, Eropa berkembang sejauh penaklukan-penaklukan Romawi mulai dari seluruh kawasan Mediterania hingga Inggris. Tanah Germania masih merupakan sesuatu yang sama sekali bukan Eropa.

Pada abad XIV zaman Rainasan datang dan abad Pencerahan pun dimulai. Eropa kembali mendefinisikan dirinya. Eropa tidak lain menganut nilai-nilai demokrasi, humanisme, dan sekularisme. Inilah cara baru bagaimana intelektual mendefinisikan Eropa hingga sekarang. Lantas dengan datangnya imigran-imigran Muslim, sekali lagi, Eropa harus mendefinisikan dirinya. Jawaban bagi Eropa adalah Euro-Islam. Karena, dengan Euro-Islam, muslim dan Eropa akan mampu bersatu untuk kedua kalinya semenjak Andalusia.

Euro-Islam yang dicetuskan oleh Bassam Tibi dan Tariq Ramadan merupakan sebuah identitas yang ingin dibentuk di kalangan Muslim Eropa. Menurut Finnemore dan Sikkink sebuah identitas berawal dari adanya norma. Sebelum menjadi identitas, Euro-Islam adalah sebuah norma. Sampai saat ini, norma tersebut sedang dalam proses pembentukannya.

Proses pembentukan norma Euro-Islam dimulai dengan adanya perdebatan wacana mengenai ide integrasi antara Muslim dengan Eropa yang dimunculkan oleh *norm entrepreneur*. Bassam Tibi, salah seorang intelektual Muslim Eropa didikan mazhab Frankfurt, datang dengan konsep Ide Euro-Islam sebagai sebuah usaha melakukan integrasi antara muslim dengan masyarakat Eropa. Euro-Islam menurut Tibi adalah proyek menggabungkan Islam dengan nilai-nilai Eropa seperti demokrasi dan liberalisme. Tibi menyebutnya sebagai *europeanizing of Islam*.

Tariq Ramadan, seorang filsuf dan intelektual muslim Eropa yang juga merupakan *norm entrepreneur* dari Euro Islam, tidak setuju dengan konsep Euro Islam sebagai *europeanizing of Islam*. Tariq Ramadan melihat bahwa meski Islam bersifat transnasional secara nilai, namun tetap dapat menjadi bagian dari kultur sebuah peradaban. Bagaimana menafsirkan Islam yang universal secara nilai menjadi bagian dari Eropa secara kultur adalah jalan yang harus ditempuh oleh Muslim Eropa.

Perdebatan antar keduanya menimbulkan sebuah kontestasi akan pemahaman Euro-Islam yang akhirnya pemahaman ini terejawantahkan ke dalam kerja yang sistematis. Ide Euro-Islam Tariq Ramadan menjadi pemenang dari kontestasi diskursus ini setelah ide versi Ramadan menyebar melalui pergerakan-pergerakan Muslim Eropa dalam bentuk organisasi-organisasi Islam. Finnemore dan Sikkink menyebut proses ini sebagai kemunculan *organizational platform* yang mendukung ide *norm of entrepreneur*.

Federation of Islamic Organization in Europe (FIOE), *Forum of Muslim Youth and Student Organization* (FEMYSO), dan *European Muslim Network* (EMN) menjadi contoh kemunculan organisasi yang menjadikan Euro-Islam sebagai norma yang menginspirasi platform perjuangan mereka. Usaha-usaha yang mereka lakukan tidak hanya ditujukan kepada pendidikan terhadap akar

rumpun mengenai norma Euro-Islam melainkan juga melakukan advokasi serta sosialisasi yang ditujukan kepada aktor-aktor negara nasional dan Uni Eropa.

Dari semua *targeted actors*, Uni Eropa adalah aktor yang sangat serius mendukung norma Euro-Islam. Dalam bahasa Finnemore dan Sikkink, Uni Eropa menjadi *critical actor* yang membuat norma Euro-Islam dapat bertahan dan semakin berkembang. Dengan demikian, organisasi-organisasi bentukan dari Euro-Islam lebih memilih melakukan lobi dan berinteraksi dengan Uni Eropa terkait dengan penyusunan kebijakan-kebijakan integrasi muslim dengan masyarakat Eropa yang berbasiskan norma Euro-Islam daripada dengan negara-negara nasional Uni Eropa (Parker, 2008).

Pembentukan *Forward Studies Unit* (FSU), *Group of Policy Advisers* (GOPA) yang kelak bertransformasi menjadi *Board of Policy Advisers* (BEPA) merupakan beberapa usaha yang dilakukan Uni Eropa untuk mengikutsertakan organisasi-organisasi Euro-Islam ke dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan identitas dan kehadiran muslim di Eropa. Institusi-institusi di atas menjadi instrumen bagi institusionalisasi norma Euro-Islam.

Baru-baru ini, organisasi-organisasi Euro-Islam bersama ratusan organisasi-organisasi muslim di level negara nasional menandatangani *Muslim Charter* yang sumbernya dibuat oleh FIOE. *Muslim Charter* menjadi awal dari proses institusionalisasi norma Euro-Islam di kalangan masyarakat muslim Eropa. *Muslim Charter* sendiri merupakan dokumen yang menjadi semacam konstitusi bagi muslim Eropa. Dokumen ini mengatur garis besar dasar-dasar hubungan antara warga Muslim dengan masyarakat Eropa.

Di dalam pembukaan *Muslim Charter*, tertulis dengan jelas bahwa piagam ini mencoba melihat kesamaan antara nilai-nilai muslim dengan nilai-nilai Eropa yang dapat dijunjung tinggi di atas perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Dokumen ini jelas merupakan piagam yang memuat norma Euro-Islam. Uni Eropa sendiri melalui Komisi Eropa sudah menerima secara formal *Muslim Charter*.

Meskipun belum sampai pada tahap internalisasi norma, setidaknya Euro-Islam telah menjadi *transnasional norm* pada tahapan *norm cascade*. Peneliti yakin bahwa pada dekade berikutnya, seiring dengan semakin banyak jumlah populasi muslim di Eropa, norma Euro-Islam tidak hanya menjadi bagian dari norma yang diterima oleh semua kalangan di Eropa, melainkan menjadi identitas bagi masyarakat muslim Eropa, sebagaimana yang dikatakan oleh Tariq Ramadan *you don't have to be less Muslim to be more European, you can be both*. Inilah masa depan muslim Eropa. ●

Referensi

Buku

Al-Azmeh, Aziz dan Fokas, Effie. 2007. *Islam in Europe: Diversity, Identity and Influence*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Esposito, John dan Burgat, François. 2003. *Modernizing Islam: Religion in the Public Sphere in the Middle East and in Europe*. New York: Rutgers University Press.
- Fetzer, Joel S. dan Soper, J. Christopher. 2005. *Muslims and the State in Britain, France, and Germany*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Huntington, Samuel. P. 1996. *Benturan antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Qalam.
- Kastoryano, Riva. 2002. *Negotiating Identities: States and Immigrants in France and Germany*. Princeton dan Oxford: Princeton University Press.
- Marechal, Brigitte, Stefano Allievi, Felice Dassetto & Jorgen S. Nielsen. 2003. *Muslim in the Enlarged Europe: Religion and Society*. Leiden: Koninklijke Brill NV.
- Modood, Tariq, Andafyllidou, Anna Tri, dan Zapata-Barrero, Richard. 2006. *Multiculturalism, Muslim, and Citizenship: A European Approach*. New York: Routledge.
- Ramadhan, Tariq. 2004. *Western Muslim and The Future of Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Shadid, W.A.R. dan van koningsveld, P.S. 1996. *Muslims in the Margin: Political Responses to the Presence of Islam in Western Europe*. Kampen: Kok Pharos.
- Tibi, Bassam. 2008. *Political Islam, World Politics and Europe: Democratic Peace and Euro-Islam versus Global Jihad*. New York: Routledge.

Jurnal Ilmiah

- Byers, Jan. Multiple "Embeddedness and Socialization in Europe: The Case of Council Officials", *International Organization* 59: 2005, hlm. 899-936.
- Cesari, Jocelyn. "Islam in the West: From Immigration to Global Islam", *Harvard Middle Eastern and Islamic Review* 8 (2009), hlm. 148-175
- Finnemore, Martha & Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change, dalam International Organization" Vol. 52, No. 4, *International Organization at Fifty: Exploration and Contestation in the Study of World Politics*. (Autumn, 1998), hlm. 887-917.
- Salvatore, Armando. "Authority in Question Secularity, Republicanism and 'Communitarianism' in the Emerging Euro-Islamic Public Sphere", *Theory, Culture & Society* 2007, Vol. 24(2): 135-160.
- Savage, Timothy M. "Europe and Islam: Crescent Waxing, Cultures Clashing", *The Washington Quarterly* Summer 2005 Vol. 27:3, hlm. 25-50

Internet

- <http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,440340,00.html>
- <http://www.tariqramadan.com/spip.php?article10497>
- <http://www.redpepper.org.uk/Living-together-an-interview-with>
- <http://www.euro-muslims.eu/>